



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.216/M.PPN/HK/12/2019
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHASILKAN DARI
PROGRAM *COMPACT* - HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION*
YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas atas nama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.715/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada PT. MKA, B.716/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada PKSPL IPB, B.717/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Hivos Terang, B.718/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Swisscontact, B.719/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Yayasan WWF WI, B.720/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Rainforest Alliance, B.721/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Perkumpulan Menapak, B.722/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Yayasan Peka Indonesia, B.723/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober

2019 ...

2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada MPM Muhammadiyah, B.724/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada SSS Pundi Sumatera, B.725/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Yayasan WRI, B.726/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Yayasan Javlec, B.727/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada CU Keling Kumang, B.728/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Latin, B.729/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada KKI Warsi Sumatera Barat, B.730/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada KKI Warsi Jambi, B.731/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada IIEE, B.732/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada SCF, B.733/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Yayasan WWF W2, B.734/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Jurnal Celebes, B.699/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Provinsi Jambi, B.700/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Provinsi NTB, B.701/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Kabupaten Berau, B.702/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Kabupaten Sintang, B.703/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Kabupaten Sumba Barat Daya, B.704/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Kabupaten Sumba Tengah, B.757/M.PPN/D.8/PL.08.03/10/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara yang dihasilkan dari Program *Compact – Hibah Millennium Challenge Coproration*, dari daftar Barang Milik Negara Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihasilkan dari dari Program *Compact-Hibah Millennium Challenge Coproration*, yang diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah daerah;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.06/2018;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM *COMPACT-HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH.
- PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa Tablet tambah darah, Antropometri dan Cetakan Jamban yang berasal dari Program Compact-Hibah *Millennium Challenge Corporation* yang diserahterimakan kepada masyarakat dan pemerintah daerah dengan nominal Rp. 82.289.856.414,- (Delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum.



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.216/M.PPN/HK/12/2019
TANGGAL 26 DESEMBER 2019

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM *COMPACT* HIBAH *MILLENIUM CHALLENGE CORPORTAION*
YANG DISERAHTERIMAKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH

No	Kabupaten	Nomor BAST	Tanggal	Nilai Aset (Rupiah)	
1	Provinsi Jambi	006/06.13-BAST-PLUP/11/2019	18 November 2019	Rp.	1.812.278.686
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	007/06.13-BAST-PLUP/11/2019	18 November 2019	Rp.	1.349.370.757
3	Kabupaten Berau	008/06.13-BAST-PLUP/11/2019	18 November 2019	Rp.	784.354.594
4	Kabupaten Sintang	010/06.13-BAST-PLUP/11/2019	18 November 2019	Rp.	688.943.308
5	Kabupaten Sumba Barat Daya	011/06.13-BAST-PLUP/11/2019	18 November 2019	Rp.	509.648.162
6	Kabupaten Sumba Tengah	012/06.13-BAST-PLUP/11/2019	18 November 2019	Rp.	502.293.486
7	Kabupaten Luwu Timur	009/06.13-BAST-PLUP/11/2019	18 November 2019	Rp.	597.821.335
8	MKA	065/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	3.408.903.000

9	PKSPL	002/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	1.380.177.120
10	Hivos-Terang	006/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	4.758.103.808
11	Swiss Contact	004/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	2.368.727.983
12	WWF	005/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	5.448.782.601
13	Rainforest Alliance	007/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	7.368.992.882
14	Menapak	008/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	428.942.500
15	PEKA	009/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	5.440.821.000
16	Muhammadiyah	010/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	1.507.194.104
17	SSS Pundi Sumatera	011/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	3.985.974.275
18	WRI	012/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	688.198.500
19	JAVLEC	013/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	9.238.009.000
20	CU Keling Kumang	014/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	7.478.899.000
21	Latin	015/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	1.747.274.474
22	KKI Warsi Sumatera Barat	017/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	3.246.264.623
23	KKI Warsi Jambi	016/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp.	6.423.255.120

24	IEEE	018/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp. 4.784.271.382
25	SCF	019/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp. 4.785.323.214
26	WWF Indonesia	006/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp. 1.250.697.500
27	Jurnal Celebes	020/06.13-BAST-GP/11/2019	18 November 2019	Rp. 306.334.000
	TOTAL			Rp. 82.289.856.414

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati